



BAB 1

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban, evaluasi, dan transparansi. Hal ini bertujuan agar para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dapat menilai pencapaian fiskal pemerintah daerah selama tahun anggaran dan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali telah berupaya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan penerapan SAP Berbasis Akrual yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi SKPD selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan pemerintah daerah. Meski tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan para pemangku kebijakan, laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan terbatas pada penyajian informasi keuangan dan tidak diwajibkan menyajikan informasi non keuangan.

Informasi dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Karena dari Laporan Keuangan OPD akan didapatkan informasi dan penjelasan yang memadai sehingga tahap penyusunan Laporan LKPD dapat lebih handal dan transparan. Yang kemudian Laporan Keuangan akan disusun dan disajikan menjadi satu yang disebut sebagai Laporan Konsolidasi Pemerintah Daerah atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selama periode pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Boyolali berusaha mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk senantiasa dipertahankan demi menjaga kepercayaan publik dan melanjutkan prestasi kinerja keuangan yang selama ini tercermin dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua belas kali berturut-turut sejak tahun 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.



RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Boyolali disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan secara komprehensif, yaitu teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas, serta holistik-tematik, integratif, dan spasial. RPJMD Tahun 2021-2026 perlu dilaksanakan dengan komitmen tinggi seluruh komponen di Kabupaten Boyolali untuk mencapai visi **“Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi; Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (Metal)”**.

Periode RPJMD Tahun 2021-2026 sekaligus periode terakhir dalam rangka mencapai Visi RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Boyolali yang Berdaya Saing, Konstitusional, Aman, Mandiri, dan Sejahtera”.

Pemerintah Daerah memiliki 5 (lima) misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

- a. Misi 1 : Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan
- b. Misi 2 : Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
- c. Misi 3 : Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
- d. Misi 4 : Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
- e. Misi 5 : Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Laporan Keuangan Kabupaten Boyolali dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran dan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan atau mengevaluasi kinerja pemanfaatan sumber daya entitas. Laporan keuangan tersebut terdiri dari 5 (lima) laporan yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- a. Laporan Financial (*financial reports*), yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan–LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam



pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

- Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pemerintah daerah;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi penggunaan sumber daya ekonomi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 11);
- t. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



- Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 3);
- u. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 106 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali;
 - v. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 12).

4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah;
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III Penjelasan pos pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.1.1 Pendapatan – LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan-LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana
- Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

BAB V Penutup



BAB 2

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

1. PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOYOLALI

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali memiliki Program Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 yaitu Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Program-program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali tercermin dalam data capaian keuangan berikut ini:

Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali

No.	NAMA KEGIATAN		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3.043.317.000	2.984.559.845	98,07
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.465.729.000	2.435.586.563	98,78
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.625.000	2.254.482.563	98,68
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	181.104.000	181.104.000	100,00
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.738.000	336.029.483	94,46
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.640.400	92,81
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.131.500	10.428.000	93,68
	3	Penyediaan Bahan Logistik kantor	106.226.000	99.004.433	93,20
	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.500.000	19.811.150	84,30

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	5	Penyediaan Bahan/Material	32.114.000	24.679.000	76,85
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.700.000	73.400.000	99,59
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.066.500	104.066.500	100,00
3		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.900.000	62.267.000	95,94
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.900.000	62.267.000	95,94
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.200.000	49.722.777	91,74
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.262.900	83,81
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.500.000	47.459.877	92,16
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.750.000	100.954.022	98,25
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.750.000	61.087.022	97,35
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.990.000	99,95
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.877.000	99,39
2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.433.000.000	1.207.949.725	84,30
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	99.494.850	99,49
	1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	99.494.850	99,49
	2	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.308.000.000	1.083.577.000	82,84
	1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.308.000.000	1.083.577.000	82,84
	3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25.000.000	24.877.875	99,51
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	25.000.000	24.877.875	99,51



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		4.522.000.000	4.502.265.000	99,56
	1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50.000.000	49.062.000	98,12
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	50.000.000	49.062.000	98,12
	2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	9.000.000	9.000.000	100,00
	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	9.000.000	9.000.000	100,00
	3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.463.000.000	4.444.203.000	99,58
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.060.000.000	3.045.000.000	99,51
	2	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1.071.000.000	1.071.000.000	100,00
	3	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	332.000.000	328.203.000	98,86
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		21.177.000.000	21.177.000.000	100,00
	1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	21.177.000.000	21.177.000.000	100,00
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	21.177.000.000	21.177.000.000	100,00
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		190.000.000	189.292.550	99,63
	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	190.000.000	189.292.550	99,63
	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	190.000.000	189.292.550	99,63
			30.365.317.000	30.061.067.120	99,00

Bidang Perumahan didukung dengan lima program utama yang terinci sebagai berikut:



No	Program	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.043.317.000	2.984.559.845	98,07
2	Program Pengembangan Perumahan	1.433.000.000	1.207.949.725	84,30
3	Program Kawasan Permukiman	4.522.000.000	4.502.265.000	99,56
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	21.177.000.000	21.177.000.000	100,00
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kumuh	190.000.000	189.292.550	99,63
JUMLAH		30.365.317.000	30.061.067.120	99,00

Capaian realisasi terendah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Program Pengembangan Perumahan sebesar 83,30%, sementara untuk capaian tertinggi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebesar 100,00%.

2) Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali dalam Pencapaian Target Belanja :

- 1. Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terkendala proses tukar guling lahan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan tanah warga masih proses penyelesaian.
- 2. Peningkatan kualitas RTLH hambatannya adalah kesesuaian data usulan dan kemampuan swadaya

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir hambatan dan kendala dalam pencapaian target yaitu :

- 1. Melaksanakan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, antara lain Dispermasdes Kab Boyolali, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 2. Koordinasi dengan perangkat desa, masyarakat, dan organisasi sosial (Baznas) untuk membantu swadaya dalam pelaksanaan kegiatan. Jika itu tidak memungkinkan dilaksanakan penggantian penerima bantuan peningkatan kualitas RTLH.



BAB 3

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggaran untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Laporan Realisasi Anggaran menggunakan anggaran dan realisasi Perbup Perubahan Penjabaran APBD karena pada Tahun Anggaran 2023 terdapat perubahan rincian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, setelah adanya perubahan APBD maka disusunlah Perbup Penjabaran Perubahan APBD yaitu Perbup No.54 Tahun 2023 tanggal 19 September 2023.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Belanja

Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali pada Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai Rp30.061.067.120,00 atau 99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.365.317.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp304.249.880,00 atau 1%. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.531.326.637,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.529.740.483,00 atau 22,54%. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.8 Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022

Ref.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.b.1	Belanja Operasi	29.708.417.000,00	29.411.592.120,00	99	23.662.721.718,00
5.1.b.2	Belanja Modal	656.900.000,00	649.475.000,00	98,87	868.604.919
	Jumlah	30.365.317.000,00	30.061.067.120,00	99	24.531.326.637

5.1.b.1) Belanja Operasi

Rp29.411.592.120,00

Realisasi Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 sebesar 29.411.592.120,00 atau 99 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 29.709.417.000,00. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 23.662.721.718,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.748.870.402,00 atau 24,29%. Rincian belanja operasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.1.9 Realisasi Belanja Operasional Tahun 2023 dan 2022

Ref.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.b.1.a	Belanja Pegawai	2.284.625.000,00	2.254.482.563,00	98,68	2.384.144.257,00
5.1.b.1.b	Belanja Barang dan Jasa	1.519.792.000,00	1.492.109.557,00	98,18	1.435.677.461,00
5.1.b.1.c	Belanja Bantuan Sosial	25.904.000.000,00	25.665.000.000,00	99,08	19.842.900.000,00
	Jumlah	29.708.417.000,00	29.411.592.120,00	99,00	23.662.721.718,00

Rincian realisasi Belanja Operasional diuraikan sebagai berikut:

5.1.b.1.a) Belanja Pegawai

Rp. 2.254.482.563,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.254.482.563,00,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp2.284.625.000,00. Bila dibandingkan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.384.144.257,00 mengalami penurunan sebesar Rp129.661.694,00 atau 5,75%.

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.10 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.333.015.000	1.326.293.663	99,5	2.384.144.257
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	951.610.000	928.188.900	97,54%	952.330.762
	Jumlah	2.284.625.000	2.254.482.563	98,68	3.336.475.019

5.1.b.1.b) Belanja Barang dan Jasa

Rp1.492.109.557,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.492.109.557,00 atau 98,18% dari anggarannya sebesar Rp1.519.792.000,00.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.11 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	253.671.500	233.675.883	92,12	260.183.164
2	Belanja Jasa	1.519.792.000	1.492.109.557	98,18	1.435.677.461
3	Belanja Perjalanan Dinas	104.066.500	104.066.500	100,00	72.366.400
4	Belanja Pemeliharaan	96.250.000	96.114.522	99,86	79.989.500
	Jumlah	1.519.792.000	1.492.109.557	98,18	1.435.677.461



5.1.b.1.d) Belanja Bantuan Sosial Rp25.665.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25.665.000.000,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp 25.904.000.000,00 bila dibandingkan realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 19.842.900.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.822.100.000 atau 29,34%.

Realisasi Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rincian realisasi belanja bantuan sosial terdapat pada **lampiran 5.12**. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12b Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada individu	25.904.000.000	25.665.000.000	99,08	19.842.900.000
	Jumlah	25.904.000.000	25.665.000.000	99,08	19.842.900.000

5.1.b.2) Belanja Modal Rp649.475.000,00

Realisasi Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp649.475.000,00 atau 98,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 656.900.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp868.583.919,00 mengalami penurunan sebesar Rp219.108.919 atau 33,74%.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.13 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Ref.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.b.2.b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.900.000	290.670.000	97,90	13.265.919
5.1.b.2.d	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	360.000.000	358.805.000	99,67	855.318.000
	Jumlah	656.900.000	649.475.000	98,87	868.583.919

Uraian berikut merupakan Rincian realisasi Belanja Modal TA. 2023:

5.1.b.2.b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 290.670.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **290.670.000,00** atau



82,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp199.556.335.250,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.591.280.272,00 mengalami kenaikan sebesar Rp76.747.593.981,00 atau 86,63%.

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2023 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin sehingga dapat digunakan.

Tabel 5.1.15 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	228.403.000
2	Pengadaan Alat Kantor	62.267.000
	JUMLAH	290.670.000

5.1.b.2.d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 358.805.000,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp358.805.000,00 atau 99,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp360.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp855.318.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp496.513.000,00 atau 137,92%.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, jaringan, dan instalasi tersebut siap digunakan.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.16**. Berikut tabel realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023:

Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Jalan desa	358.805.000
	Jumlah	358.805.000

5.1.g. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp304.249.880,00
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 304.249.880,00. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran belanja selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran	Rp 30.365.317.000
- Belanja	Rp 30.061.067.120
- Belanja Transfer	Rp -
- Defisit	Rp 304.249.880
- Pembiayaan Netto	Rp -
- SiLPA Tahun Anggaran 2023	Rp 304.249.880

2. Neraca
 Neraca Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.1 Rincian Neraca

No.	Uraian Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Aset Lancar	20.284.567,00	62.392.535,73
2	Aset Tetap	27.686.731.565,00	27.037.256.565,00
3	Aset Lainnya	13.865.500,00	13.865.500,00
	Jumlah Aset	27.720.881.632,00	27.113.514.600,73
	Kewajiban dan Ekuitas		
1	Kewajiban	31.048.552.796,16	25.922.007.639,76
2	Ekuitas	27.022.777.548,73	27.022.777.548,73
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	58.071.330.344,89	52.944.785.188,49

a. Aset Lancar
 Aset Lancar terdiri dari Kas, Setara Kas dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.284.567,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar

Ref.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.a.6	Persediaan	20.284.567,00	62.392.535,73
	Jumlah	20.284.567,00	62.392.535,73

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.a.6) Persediaan Rp20.284.567,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.284.567,00 merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksud



untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2023.

Beberapa jenis Persediaan meliputi dan tidak terbatas pada Persediaan Bahan Pakai Habis, Persediaan Bahan/ Material dan Persediaan Barang Lainnya. Persediaan Bahan Pakai Habis antara lain seperti Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), alat listrik dan elektronik, peranko, materai, dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak dan gas, isi tabung gas, dan Persediaan Bahan Habis Pakai Lainnya.

Persediaan Bahan/ Material meliputi Persediaan bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok, bahan/peralatan laboratorium, bahan/peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, dan bahan/material lainnya. Sedangkan Persediaan Barang Lainnya mencakup persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Selain itu ada persediaan bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kantor, obat-obatan, pipa dan persediaan penelitian.

Tabel 5.3.9 Persediaan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
A.	Persediaan Bahan Pakai Habis		
1	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	7.221.567,00	13.105,00
2	Persediaan isi tabung gas		2.380.950,00
3	Persediaan Alat Tulis Kantor	10.340.000,00	49.109.142,73
4	Persediaan Kertas dan Cover		2.025.000,00
5	Persediaan Alat Listrik	1.383.000,00	360.000,00
6	Persediaan Bahan / Alat Kantor Lainnya	1.340.000,00	8.504.338,00
	Jumlah	20.284.567,00	62.392.535,73

b. Aset Tetap

Rp27.686.731.565,00

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.686.731.565,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.037.256.565,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.12 Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

Ref.	Uraian	TA 2023	TA 2022
		(Rp)	(Rp)
5.3.c.1	Tanah	6.019.209.000,00	6.019.209.000,00
5.3.c.2.	Peralatan dan Mesin	2.254.229.422,00	1.963.559.422,00
5.3.c.3	Gedung dan Bangunan	10.343.758.142,00	10.343.758.142,00
5.3.c.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.735.490.076,00	14.376.685.076,00
5.3.c.5	Aset Tetap Lainnya	201.000,00	201.000,00
5.3.c.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0
5.3.c.7	Akumulasi Penyusutan	-5.666.156.075,00	-5.666.156.075,00
	Jumlah	27.686.731.565,00	27.037.256.565,00



Tabel 5.3.13 Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

Ref.	Uraian	Saldo Neraca per	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Saldo Neraca per
		31 Desember 2022			31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.3.c.1	Tanah	6.019.209.000,00			6.019.209.000,00
5.3.c.2	Peralatan dan Mesin	1.963.559.422,00	290.670.000,00		2.254.229.422,00
5.3.c.3	Gedung dan Bangunan	10.343.758.142,00			10.343.758.142,00
5.3.c.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.376.685.076,00	358.805.000,00		14.735.490.076,00
5.3.c.5	Aset Tetap Lainnya	201.000,00			201.000,00
5.3.c.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0			0,00
5.3.c.7	Akumulasi Penyusutan	-5.666.156.075,00			-5.666.156.075,00
	Jumlah	27.037.256.565,00	649.475.000,00	0,00	27.686.731.565,00

5.3.c.1) Tanah Rp 6.019.209.000,00

Aset Tetap Tanah milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.019.209.000,00.

5.3.c.2) Peralatan dan Mesin Rp 2.254.229.422,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebesar Rp1.963.559.422,00 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp290.670.000,00 sehingga nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.254.229.422,00.

5.3.c.3) Gedung dan Bangunan Rp10.343.758.142,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.343.758.142,00 tidak mengalami perubahan, sehingga nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.343.758.142,00.

5.3.c.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp15.590.808.076,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.376.685.076,00 mengalami penambahan sebesar Rp358.805.000,00 sehingga nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.735.490.076,00.

5.3.c.5) Aset Tetap Lainnya Rp201.000,00

Aset Tetap Lainnya milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali per 31 Desember



2022 sebesar Rp201.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp201.000,00

5.3.c.7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp-5.666.156.075,00

Akumulasi Penyusutan milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2023 sebesar Rp. -5.666.156.075,00

c. Aset Lainnya Rp66.148.005.516,91

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 27.731.000,00 terinci atas:

Tabel 5.3.18 Aset Lainnya per Tahun 2023 dan 2022

Ref	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.d.3	Aset Tidak Berwujud	69.327.500,00	69.327.500,00
5.3.d.3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(55.462.000,00)	(55.462.000,00)
	Jumlah	13.865.500,00	13.865.500,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

5.3.d.3) Aset Tidak Berwujud Rp 69.327.500,00

Aset Tidak Berwujud milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.327.500, 00

5.3.d.5) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp 55.462.000,00

Amortisasi Aset Tidak Berwujud milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2023 sebesar Rp 55.462.000,00

d. Kewajiban

Akun Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.147.067.754,00 terinci atas:

Tabel 5.3.19 Kewajiban Tahun 2023 dan 2022

Ref	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.3.e.1	Utang Belanja	86.000.634,00	90.737.052,00
5.3.e.2	RK PPKD	30.061.067.120,00	
	Jumlah	30.147.067.754,00	90.737.052,00

5.3.e.3) Utang Beban Rp86.000.634,00

Merupakan Utang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran, seperti beban listrik, telepon, internet, dan air bulan Desember 2023, utang beban pegawai insentif, honor pengelola BLUD, persediaan bahan bakar



minyak, gas, dan pelumas, pajak kendaraan bermotor, serta beban penggantian suku cadang.

Tabel 5.3.20 Utang Beban Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023 Rp	2022 Rp
1	Utang Beban Pegawai	80.843.762,00	87.172.788,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	5.156.872,00	3.564.264,00
	Jumlah	86.000.634,00	90.737.052,00

5.3.f Ekuitas

Rp27.022.777.548,73

Ekuitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sebesar Rp 27.700.597.065,00 mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp177.869.516 dari tahun 2022 sebesar Rp 27.022.777.548,73 jika dibandingkan nilai Ekuitas tahun 2022.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Laporan Operasional

Ref.	Uraian	Saldo TA 2023 (Rp)	Saldo TA 2022 (Rp)
5.4.b	Beban	29.411.592.120,00	23.632.187.981,27

Penjelasan rinci Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

5.4.b Beban Daerah

Rp29.411.592.120,00

Beban adalah kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.411.592.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Realisasi Beban – LO

No.	Uraian	Saldo TA 2023 (Rp)	Saldo TA 2022 (Rp)
1	Beban Operasi	29.177.916.237	26.148.919.402,27
2	Beban penyusutan dan amortisasi		1.647.263.421,00
	Jumlah	29.177.916.237	27.796.182.823,27



Rincian beban operasi – LO sebesar Rp29.177.916.237,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Realisasi Beban Operasi – LO

Ref	Uraian	Saldo TA 2023 (Rp)	Saldo TA 2022 (Rp)
5.4.b.1	Beban Pegawai - LO	2.254.482.563	3.336.475.019
5.4.b.3	Beban Jasa	1.058.252.652	1.023.138.397
5.4.b.4	Beban Pemeliharaan	96.114.522	79.989.500
5.4.b.5	Beban Perjalanan Dinas	104.066.500	72.366.400
5.4.b.7	Beban Bantuan Sosial	25.665.000.000,00	19.842.900.000,00
5.4.b.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi		1.647.283.421,00
	Jumlah	29.177.916.237,00	26.002.152.737,00

5.4.b.1) Beban Pegawai

Rp2.254.482.563,00

Jumlah Beban Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali untTahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.254.482.563,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Realisasi Beban Pegawai – LO

No.	Uraian	Saldo TA 2023 (Rp)	Saldo TA 2022 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.326.293.663	2.384.144.257
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	928.188.900	952.330.762
	Jumlah	2.254.482.563	3.336.475.019

5.4.b.2) Beban Persediaan

Rp20.284.567,00

Jumlah Beban Persediaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.284.567,00, mengalami penurunan sebesar Rp42.107.968,73 atau 207,59% dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.392.535,73.

Beban Persediaan sebesar Rp20.284.567 terdiri dari:

1	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	7.221.567,00
3	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	10.340.000,00
5	Persediaan Alat Listrik	Rp	1.383.000,00
6	Persediaan Bahan / Alat Kantor Lainnya	Rp	1.340.000,00
	Jumlah	Rp	20.284.567,00



5.4.b.3) Beban Jasa

Rp1.058.252.652,00

Jumlah Beban Jasa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.058.252.652,00**, mengalami penurunan sebesar Rp 35.114.255 atau 3,43% dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 1.435.677.461**

Beban Jasa sebesar Rp1.058.252.652,00 terdiri dari:

- Belanja Jasa Kantor	Rp	909.695.802,00
- Belanja Jasa Konsultan	Rp	148.556.850,00
Jumlah	Rp	1.058.252.652,00

5.4.b.4) Beban Pemeliharaan

Rp96.114.522,00

Jumlah Pemeliharaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp96.114.522,00, mengalami kenaikan sebesar Rp16.125.022,00 atau 20% dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 79.989.500,00.

Beban pemeliharaan sebesar Rp16.337.331.340,00 terdiri dari:

- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	76.237.522,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	19.877.000,00

5.4.b.5) Beban Perjalanan Dinas

Rp104.066.500,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.066.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp31.700.100,00 atau 44% dibanding tahun 2022 sebesar Rp 72.366.400,00.

5.4.b.7) Beban Bantuan Sosial

Rp25.665.000.000,00

Beban Bantuan Sosial terdiri atas bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok masyarakat. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp25.665.000.000,00.



4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.a Ekuitas Awal

Rp27.022.727.548,73

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp 28.654.235.814 merupakan reklasifikasi dari Ekuitas Dana Tahun 2023 sebagai berikut:

1.	Ekuitas Awal (2022)	Rp	28.654.235.814,00
2.	Surplus/Defisit-LO	Rp	26.148.919.402,27
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	13.865.500,00
	Jumlah	Rp	27.022.727.548,73

5.6.b Surplus/Defisit – LO

Rp 29.383.247.603,73

Penambahan ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp **27.022.727.548,73**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp00

a. Ekuitas Akhir

Rp27.700.597.065,00

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar **Rp27.700.597.065,00** terinci sebagai berikut:

1)	Ekuitas Awal	Rp	27.022.727.548,73
2)	Surplus/Defisit – LO	Rp	29.383.247.603,73
3)	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	0
	Jumlah		Rp 27.700.597.065,00



BAB 4

Penjelasan Atas Informasi Penting Lainnya

1. Informasi Umum Kabupaten Boyolali

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah OPD yang terletak di Perkantoran Terpadu Alun-Alun Lor, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosong, Kabupaten Boyolali. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah OPD yang memiliki tugas untuk Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Kepala Dinas : Ir. Cipto Budoyo, MM, MT

Sekretariat

- Sekretaris : Mulyanto, S.Sos., MM
- Kasubbag TU : Retnowati Kartini, SE
 - Staff : 1. Aris Khairul Fuad, ST
 - 2. Emiek Ernawati, Amd
 - 3. Basuki
- Sub Koordinator Perencana dan Pelaporan (Perencana Ahli Muda) : Sriyono, ST, MT

Bidang Perumahan

- Kepala Bidang : Tulus Raharjo, AP
- Seksin Perumahan Swadaya
 - Staff : 1. Gunawan
- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Subkoordinator Perumahan Umum dan Komersial) : Mardiyana, S.Sos
 - Staff : 1. Supadi
 - 2. Shofi Nur Inayati, ST

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

- Kepala Bidang : Okta Dwi Prabowo, ST, M.Eng
- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda : -
 - Staff : 1. Satrio Utomo Nur H, Amdt
- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (subkoordinator pengawasan Dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman) : Erwan Harjanto, ST, MT
 - Staff : 1. Wiyono, SE
 - 2. Aulia Kurnia Putri, ST

Jumlah pegawai per 31 Desember 2023 sebanyak 17 personil dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6.1.1 Jumlah Pegawai SKPD Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali

Golongan	ESELON					Fungsional	Staf	Total
	I	II	III	IV	V			
Eselon II		1						1
ESELON III			3					3
Golongan IV	-			4				4
Golongan III	-						5	5
Golongan II	-						4	4
Golongan I	-							
Jumlah	-	1	3	4			10	17

Diisi struktur organisasi OPD. Beserta jabatan, nam pejabat struktural dan pelaksana. Atau informasi non keuangan lainnya yang menambah penjelasan pada OPD yang bersangkutan.

3. Informasi Lainnya

-



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020) Basis Akrual, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.061.067.120,00 atau 99% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 30.365.317.000,00.

Sedangkan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 30.061.067.120,00 terdiri dari:

a. Belanja Operasi	Rp	29.411.592.120,00.
b. Belanja Modal	Rp	649.475.000,00
Jumlah	Rp	30.061.067.120,00

1. Neraca Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp 58.071.330.344,89, jumlah Kewajiban sebesar Rp 31.048.552.796,16 dan jumlah Ekuitas sebesar Rp 27.022.777.548,73.
2. Laporan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2023 ditutup Beban-LO sebesar Rp29.411.592.120,00
3. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023 ditutup dengan saldo akhir ekuitas sebesar Rp27.700.597.065,00.

Demikian beberapa catatan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan secara naratif, analitis, dan daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Operasional. CaLK ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami laporan dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BOYOLALI

I. CIPTO BUDOYO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630303 199203 1 015